KORAN SINDO
16 APRIL 2016

MPR Ingin Hidupkan Kembali GBHN

IST

Ketua MPR Zulkifli Hasan saat berdialog dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) di Gedung Wilis Kepatihan Yogyakarta, kemarin. Dalam dialog itu MPR berencana menghidupkan kembali GBHN.

YOGYAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, terlepas pro dan kontra, pada saat ini banyak hal yang memprihatinkan tumbuh di masyarakat Indonesia. "Sejak era reformasi, kesenjangan kekayaan dan sosial serta pudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat," kata Zulkifli saat membuka *Focus Group Discussion* reformulasi sistem perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN di Yogyakarta, kemarin.

Zulkifli berpendapat pudarnya wawasan kebangsaan karena tidak ada media untuk menyosialisasikan nilai-nilai itu. "Kepala daerah tidak mempunyai anggaran untuk itu. Ini berbeda pada masa Presiden Soeharto yang ada BP7," kata Zulkfli.

Zulkifli yang juga Ketua Umum DPP PAN ini mengatakan, MPR Periode 2009-2014 sudah mengeluarkan rekomendasi agar MPR Periode 2014-2019 mereformulasikan sistem pembangunan nasional model GBHN. GBHN akan dijadikan landasan bagi pemerintah pusat dan daerah. GBHN yang direformulasikan nanti mengambil pengalaman, baik pada masa Presiden Soeharto lewat Repelita dan Presiden Soekarno lewat pembangunan Semesta.

Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Kepatihan Yogyakarta, MPR mendapat masukan dari Raja Keraton Yogyakarta ini. "Keinginan menghidupkan GBHN perlu didialogkan. Semakin luas mendialogkan, akan semakin bagus," kata Sultan.

Sultan mengatakan, jika GBHN kembali ada, maka jangan sampai haluan negara itu diabaikan presiden dan kepala daerah. "Kalau itu sudah disepakati, jangan melenceng dari haluan negara itu," kata Sultan.

Sementara Dosen FH UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, jika akan ada GBHN, maka harus diubah dulu sistem pemerintahannya. Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer. "Idenya benar, harus ada garis besar haluan negara," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM ini.

Zainal mengungkapkan, sebenarnya Indonesia masih memiliki haluan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang. "Cuma tidak terintegrasi," ujar Zainal.

Menurut Zainal, isu pengembalian GBHN yang saat ini ada lebih mengarah pada pembuatan GBHN dilakukan MPR RI. Jika demikian, secara tidak langsung sistem pemerintahan akan bertahan yang dianut Indonesia saat ini, yakni presidensial.

"Perlu dipikirkan kembali siapa yang nanti akan membuat GBHN. Jika presiden, otomatis dalam GBHN tersebut harus diperhatikan pula program jangka pendeknya, yakni selama masa 5 tahun presiden menjabat. Karena untuk perumusan jangka panjang, Undang-Undang Dasar sudah merumuskan target pembangunan nasional sendiri," kata Zainal.

Dosen Ilmu Pemerintah UMY Tunjung Sulaksono mengatakan, tidak benar jika sejak reformasi 1998 lalu Indonesia berjalan tanpa perencanaan. Meskipun GBHN dihapus saat reformasi, tapi secara substansial ada bentuk lainnya, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"Dengan demikian, urgensi menghidupkan kembali GBHN menjadi tidak justified karena ada RPJP. Persoalannya, RPJM diwadahi hanya dalam Perpres. Hal ini memunculkan pemikiran perlunya GBHN dengan konsensus yang lebih kuat sehingga lebih menjamin konsistensi dan kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan nasional," kata Tunjung.